

Terms of Reference

Diskusi Publik

**KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI MASA PANDEMI
COVID-19 DI INDONESIA TIMUR**

KOMNAS PEREMPUAN - AIPJ2

9 Desember 2021

LATAR BELAKANG

Dalam kultur dimana kekerasan dianggap sebagai praktik yang biasa, kejadian kekerasan menjadi bagian dari persoalan harian yang terus berulang. Lemahnya perlindungan dan bahkan pandangan yang menyalahkan korban, norma sosial yang permisif terhadap praktik kekerasan, dan tidak efektifnya skema penegakan hukum, menyumbang pada reproduksi kekerasan. Ini terjadi melalui beragam cara di lokus yang beragam: mulai dari rumah, kebun, tempat publik seperti sekolah dan pasar serta sarana transportasi umum dan jalan raya. Pelaku kekerasan bisa saja orang terdekat seperti ayah atau paman, tokoh agama atau tokoh masyarakat, guru atau polisi hingga pesohor ataupun pejabat publik. Problem relasi kuasa menjadi penjelas atas persoalan kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Relasi kuasa juga yang menjadikan, banyak kasus kekerasan yang tersembunyi, pelaku bisa bebas tanpa mendapatkan sanksi, sementara korban berjuang sekuat tenaga untuk bertahan hidup.

Meningkatnya krisis, juga sering memicu persoalan kekerasan dan problem relasi kuasa yang sudah ada sebelum krisis, mengantarkan pada kondisi yang lebih buruk bagi korban dan sistem pendukung yang ada. Krisis seperti bencana termasuk bencana pandemi, konflik sosial atau krisis lainnya berisiko meningkatkan prevalensi kekerasan di satu sisi, dan menurunkannya akses perlindungan bagi korban di sisi yang lain. Sebelum pandemi, persoalan kesenjangan dalam pembangunan adalah fakta, namun pandemi bisa memperparah kesenjangan gender yang ada. Hal ini juga merupakan salah satu temuan penting dari kajian yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dengan dukungan AIPJ2 tentang Dampak Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan. Hasil kajian¹ menunjukkan menemukan bahwa kerentanan berbasis gender telah menempatkan perempuan dan kelompok rentan (seperti lansia, anak-anak, perempuan kepala keluarga, transgender, dan orang dengan disabilitas -untuk menyebut sebagai contoh), menanggung dampak yang berlipat dari pandemi. Hal ini bisa ditemukan pada berbagai bentuk, mulai dari peningkatan risiko kekerasan dan beban ganda pada perempuan, keterbatasan akses terhadap program jaminan sosial, dampak kepada kesempatan kerja dan kesehatan reproduksi, hingga soal akses informasi pandemi. Memang perempuan tidak bisa didefinisikan sebagai kelompok yang homogen, karena narasi kerentanan akan berbeda dan dipengaruhi oleh status sosial seperti kelas ekonomi, status perkawinan, orientasi seksual, umur dan akses kepada teknologi dan informasi, dan status sosial lainnya. Sebagian isu gender tersembunyi di ranah privat, dianggap sebagai hal yang biasa atau seharusnya. Sementara sebagian isu gender yang lain terjadi di ranah public, namun belum sepenuhnya dianggap sebagai isu yang perlu menjadi prioritas dalam kebijakan publik. Pandemi, terutama karena pembatasan mobilitas dan transisi ke daring, berpotensi menjadikan perempuan menghadapi faktor penyulit yang berlipat untuk mengakses layanan perlindungan bagi korban kekerasan.

¹ Hasil kajian telah diterbitkan dalam bentuk 1 buku, 3 policy brief, 1 infografis dan 1 videografis. Secara lengkap, bisa diakses di <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding>

Ilustrasi semacam itu bisa ditemukan dari berbagai kasus kekerasan yang ada di sekitar kita. Awal Oktober 2021, satu liputan media tentang perkosaan anak diduga dilakukan oleh ayah di Luwu Timur, menyita perhatian publik. Kasus pertama kali diangkat di projectmultatuli -yang kemudian mendapatkan serangan siber setelah viral, menggambarkan betapa penanganan proses hukum yang terjadi mengundang banyak pertanyaan dan perlindungan bagi korban dan saksi pelapor. Tak lama setelah itu, juga muncul kasus di Buru Selatan - Maluku, di mana Ketua MUI setempat menikahkan anaknya yang masih SMP, dan berdalih bahwa hal ini merupakan praktik yang bisa. Apa yang muncul ke permukaan ini, adalah hanya puncak dari gunung es. Diyakini bahwa ada jauh lebih banyak kasus kekerasan yang tersembunyi dan tidak tersentuh, termasuk di kawasan yang jauh dari jangkauan media di pelosok nusantara. Secara khusus, konteks Indonesia Timur juga perlu menjadi perhatian, dimana selain persoalan norma sosial dan budaya, juga terdapat tantangan yang berarti terkait hambatan geografis, serta persoalan kapasitas institusi publik untuk perlindungan korban dan penegakan hukum. Pembatasan mobilitas dan transformasi dari luring ke daring dalam pandemi berpotensi meningkatkan hambatan akses perlindungan korban dengan buruknya infrastruktur teknologi komunikasi di kawasan ini.

Di sisi yang lain, kita juga perlu merekognisi bagaimana upaya-upaya perempuan untuk beradaptasi dan melakukan perjuangan paling gigih dalam merawat kehidupan dan menguatkan korban juga telah dilakukan di kawasan Indonesia Timur ini. Dalam kajian yang sama, juga merangkum kegigihan lembaga pengada layanan untuk memastikan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan sebagaimana dicontohkan dari pengalaman LIBU di Palu dan LAPPAN di Ambon. Ini menjadi bukti-bukti awal tentang perempuan yang pantang menyerah ketika menghadapi pandemi, berupaya mencari celah dan siasat untuk bertahan hidup, dengan membagi niat baik dan sumber daya baik dengan sesama perempuan ataupun juga laki-laki dan pihak-pihak yang lebih luas. Inilah kontribusi perempuan yang berarti dalam membangun adaptasi dan ketangguhan pandemi, melalui peran-peran yang sederhana namun sangat berarti dalam perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Pengalaman perempuan pendamping korban di LIBU dan LAPPAN juga menjadi contoh narasi Perempuan Pembela HAM (PPHAM) di masa pandemic Covid-19. Kajian Komnas Perempuan² menemukan bahwa situasi yang dihadapi PPHAM di masa pandemi ini semakin beragam dan berat. Selain kerja-kerja pendampingan, mereka juga dituntut mampu menyesuaikan dengan kondisi pandemic seperti jam pendampingan lebih panjang atau menjadi tidak terbatas karena sebagian besar layanan diberikan secara online dan membutuhkan energy yang lebih besar. Juga peningkatan belanja keluarga (seperti pembelian APD dan vitamin) hingga kerentanan tertular Covid-19 selama bekerja. Karenanya, PPHAM membutuhkan dukungan agar dapat melanjutkan kerja-kerja pendampingan bagi perempuan korban kekerasan, seperti mekanisme perlindungan (jaring pengaman sosial), akses pada tes deteksi Covid-19, perawatan memadai dan aksesible ketika terpapar covid-19 dan kegiatan pemulihan (wellbeing) agar bisa bekerja dengan lebih efektif.

Dengan latar belakang di atas, diskusi publik “Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pandemi di Indonesia Timur” ini dilakukan, atas kerjasama Komnas Perempuan dan AIPJ2. Ini merupakan bagian dari upaya membincang dan membawa isu kekerasan dan urgensi perlindungan bagi korban dalam situasi pandemi dalam konteks Indonesia Timur. Diskusi juga akan mendiseminasikan hasil kajian Pemenuhan Hak Perempuan dalam Pandemi yang sudah diterbitkan dalam paket produk pengetahuan sebagai kerja sama antara Komnas Perempuan dan AIPJ2. Kegiatan ini juga dilakukan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) dan Peringatan Hari HAM Sedunia tahun 2021.

² Komnas Perempuan, 2020. Melayani dengan Berani : Gerak Juang Pengada Layanan dan Perempuan Pembela HAM di Masa Covid-19

TUJUAN

Membangun kesadaran dan publik guna mendorong perbaikan layanan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dalam pandemi, khususnya pada wilayah Indonesia Timur

OUTPUT

1. Pemaparan dan Refleksi atas Persoalan Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pandemi di Indonesia Timur
2. Pemaparan dan Refleksi Upaya Lembaga Pengada Layanan, Komunitas, Pemerintah dan Pemangku Kepentingan di Indonesia Timur dalam Mendorong Perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan
3. Diseminasi hasil kajian Pemenuhan Hak Perempuan dalam Pandemi yang sudah diterbitkan Komnas Perempuan atas dukungan AIPJ2

KEGIATAN

Kegiatan diskusi publik ini akan dilaksanakan pada,

Hari : Kamis

Tanggal : 9 Desember 2021

Waktu : 08.00 - 11.30 WIB / 09.00 - 12.30 WITA / 10.00-13.30 WIT

Metode : Daring

AGENDA

Waktu	Sesi	Narasumber	Topik
07.45 - 08.00	Registrasi		
08.00 – 08.05	Pengantar	MC	
08.05 - 08.20	Sambutan	1. Ketua Komnas Perempuan 2. Duta Besar Australia	
08.20 - 08.30	<i>Keynote Speech</i>	Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
08.30 – 08.35		Foto Bersama I Bumper Video Tanggapan Tokoh terhadap Isu Kekerasan terhadap Perempuan	

08.35 - 09.50	Talkshow Kekerasan dan Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Situasi Pandemi di Indonesia Timur	<p>Narasumber: ³</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunitas Perempuan Inisiator Rumah Aman Berbasis Komunitas, Palu 2. Baihajar Tualeka, PPHAM/ Pengada Layanan, Ambon 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemda Kab. Timor Tengah Selatan (TTS), NTT 4. Pdt. Sheily F.A. Parinussa/Siagian, STh, Pendamping Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan - HWDI, Papua Barat 5. Rezky Pratiwi, LBH Makassar <p>Moderator: Uni Zulfiani Lubis, Pemred IDN Times</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Kekerasan dan Inisiatif Komunitas dalam Perlindungan Korban dalam Konteks Pasca Bencana dan Pandemi di Sulteng ○ Siasat Lembaga Pengada Layanan/ PPHAM di Masa Pandemi dalam Pelayanan bagi Korban di Maluku ○ Inovasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Layanan Perlindungan bagi Korban ○ Mengurai Kekerasan Berbasis Gender pada Perempuan Difabel ○ Pengalaman Pendampingan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan di Sulawesi Selatan
09.50 – 09.55		<p>Video</p> <p>“Narasi Daya Lenting (<i>Resilience</i>) Perempuan di masa pandemi Covid-19”</p>	
09.55 – 10.25		<p>Penanggap: ⁴</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reskrim Mabes POLRI 2. Jaleswari Pramodhawardhani, Deputi V, Kantor Staf Presiden 	
10.25 – 11.00		Tanya Jawab	

³ Dikemas dalam bentuk talkshow, moderator akan mengajukan 3-5 pertanyaan kunci untuk setiap narasumber. Estimasi waktu untuk setiap narasumber adalah sekitar 12-15 menit

⁴ Setiap penanggap menyampaikan tanggapannya selama 15 menit

11.00 – 11.10		Quiz – Mentimeter	
11.10 - 11.20	Diseminasi Produk Pengetahuan Hasil Kajian Komnas Perempuan	Dati Fatimah	
11.20 - 11.30	Catatan Akhir: update situasi layanan, rekomendasi & penutupan	Retty Ratnawati (Komisioner Komnas Perempuan)	